

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN
KEMANDIRIAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*
(Studi pada Kota Manado Tahun 2007-2021)**

Aulia N. Panigoro¹, Anderson G. Kumenaung², Een N. Walewangko³

¹²³*Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : panigoroaulia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian daerah sebagai variabel *intervening*. Penelitian ini menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*) yang merupakan pengembangan dari analisis regresi berganda, dengan menggunakan metode *Ordinary Least Squared* (OLS) untuk mengetahui pengaruh variabel independen, variabel *intervening* terhadap variabel dependennya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah namun pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian kemandirian daerah tidak dapat memediasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pertumbuhan Ekonomi; Kemandirian Daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of local taxes and regional levies on economic growth through regional independence as an intervening variable. This study uses path analysis which is the development of multiple regression analysis, using the Ordinary Least Squared (OLS) to determine the effect of the independent variables, the intervening variables on the dependent variable. The results of this study indicate that regional taxes and regional levies both have a positive and significant effect on economic growth while regional levies have no effect on regional independence but regional taxes have a positive and significant effect on regional independence, regional independence has a positive and significant effect on economic growth. Then regional independence cannot mediate regional taxes and regional levies with economic growth.

Keywords : Regional Taxes; Regional Levies; Economic Growth; Regional Independence.

1. PENDAHULUAN

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang sebelumnya berasaskan sentralisasi menjadi kebijakan desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Kemampuan keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah (Ariyani Enny, 2009).

Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang juga menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum

perpajakan dan retribusi daerah. Sehingga pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2007-2021

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)
2007	33.769.067.697,00	14.809.965.888,00
2008	39.281.364.818,00	19.441.434.092,00
2009	44.827.669.815,00	16.672.806.250,00
2010	44.827.669.815,00	16.672.806.250,00
2011	99.779.738.597,00	23.598.810.975,00
2012	136.226.412.000,00	27.278.328.000,00
2013	156.424.112.000,00	33.638.925.000,00
2014	187.303.746.000,00	28.906.346.000,00
2015	205.165.115.000,00	30.382.261.000,00
2016	220.497.486.000,00	43.427.454.000,00
2017	228.405.000.000,00	49.103.500.000,00
2018	291.486.238.987,00	21.998.575.690,00
2019	301.640.534.564,00	27.030.098.180,00
2020	201.375.480.853,00	21.155.277.580,00
2021	239.873.685.072,00	19.584.586.720,00

Sumber : Kota Manado Dalam Angka BPS

Berdasarkan tabel 1. yang bersumber dari Dispenda dan *website* BPS Kota Manado terlihat bahwa realisasi pajak, dalam kurun waktu 15 tahun mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. Realisasi Pajak Daerah Kota Manado Pada tahun 2007-2018 terus mengalami kenaikan tahun ke tahun dan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang signifikan dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan walaupun tidak begitu signifikan.

Tabel 2. Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Manado 2007-2021

Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Presentase Kemandirian (%)
54.715.561.525,00	443.049.500.788,00	12,35
73.898.733.040,00	514.321.132.194,00	14,37
72.404.996.767,00	520.698.963.585,00	13,91
90.828.438.199,00	509.243.122.978,00	17,84
134.721.720.942,00	574.504.145.983,00	23,45
178.307.223.000,00	687.106.887.000,00	25,95
215.871.042.000,00	757.043.191.000,00	28,52
263.392.316.000,00	813.013.594.000,00	32,40
282.525.557.000,00	926.967.599.000,00	30,48
344.955.423.000,00	1.031.123.897.000,00	33,46
306.767.257.000,00	1.036.141.852.000,00	29,61
363.177.940.171,00	940.207.664.343,00	38,63
377.379.618.671,00	981.153.083.002,00	38,47
261.756.116.854,00	927.638.991.388,00	28,22
292.635.793.645,00	919.969.610.585,00	31,81

Sumber : Manado Dalam Angka BPS

Berdasarkan tabel 2 yang bersumber dari *website* BPS Kota Manado terlihat bahwa Rasio Kemandirian dimana tahun 2007 sampai 2021 presentase berada pada 0% - 25% yang tergolong Instruktif. Pola hubungan instruktif menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pada kemandirian pemerintah daerah, artinya daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. pola instruktif tersebut menunjukkan ketergantungan pemerintah kota Manado dari sisi finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado (Persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2007	6,80
2008	8,77
2009	9,77
2010	7,30
2011	8,39
2012	8,71
2013	7,45
2014	6,69
2015	6,39
2016	7,18
2017	6,74
2018	6,65
2019	6,03
2020	-3,13
2021	4,16

Sumber : Kota Manado Dalam Angka BPS

Berdasarkan data yang bersumber dari *website* BPS Kota Manado tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado selama 2007-2021 mengalami naik turun atau fluktuatif. Tingkat Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2009 yaitu 9,77 persen dan terendah pada tahun 2020 yaitu -3,13 persen, namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4,16%. Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian, baik itu sektor pendapatan suatu daerah atau pengeluaran suatu daerah (Setyadi, Ulfah & Yana 2016). Salah satu unsur APBD yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besar kecilnya PAD akan mempengaruhi otonomi daerah dalam melaksanakan kebijakannya, semakin besar PAD maka kemampuan daerah akan lebih besar dan ketergantungan kepada pemerintah pusat berkurang (Anggraini, & Puranta, 2010).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian daerah Kota Manado.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian daerah Kota Manado.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado.
4. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado.
5. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado.
6. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian daerah Kota Manado.
7. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian daerah Kota Manado.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) yang secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan, 2005)

Pajak diatur dalam pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dimana pajak suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap rakyat yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana akan diatur dalam bentuk undang-undang untuk membiayai penyelenggaraan kehidupan bernegara, baik dalam bentuk pelaksanaan jalannya administrasi pemerintah yang dijalankan oleh setiap aparat pemerintah maupun pelaksanaan jalannya pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (Nasution, 2009).

2.2 Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi yang sangat besar dalam pengelolaan daerah. Otonomi daerah termasuk desentralisasi fiskal di mana daerah mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan yang tinggi. Dalam era otonomi ini, daerah dituntut semakin meningkatkan kemandirian (keuangan) untuk membiayai berbagai belanja daerah ketergantungan pembiayaan terhadap pemerintahan pusat harus dikurangi, seiring dengan naiknya peringkat kemandirian daerah (Prabawa dan Noviyari, 2012).

2.3 Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2004). Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut.

2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat Pertumbuhan Ekonomi maka makin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Pertumbuhan Ekonomi tidak akan terlihat tanpa hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu pun tanpa Pertumbuhan Ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagai mestinya (Siagian, 2018).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Miswar, Lianda dan Priantana 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, terhadap kinerja keuangan serta dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan dan pertumbuhan ekonomi, variabel kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Gafar, 2019).

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap kemandirian yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah

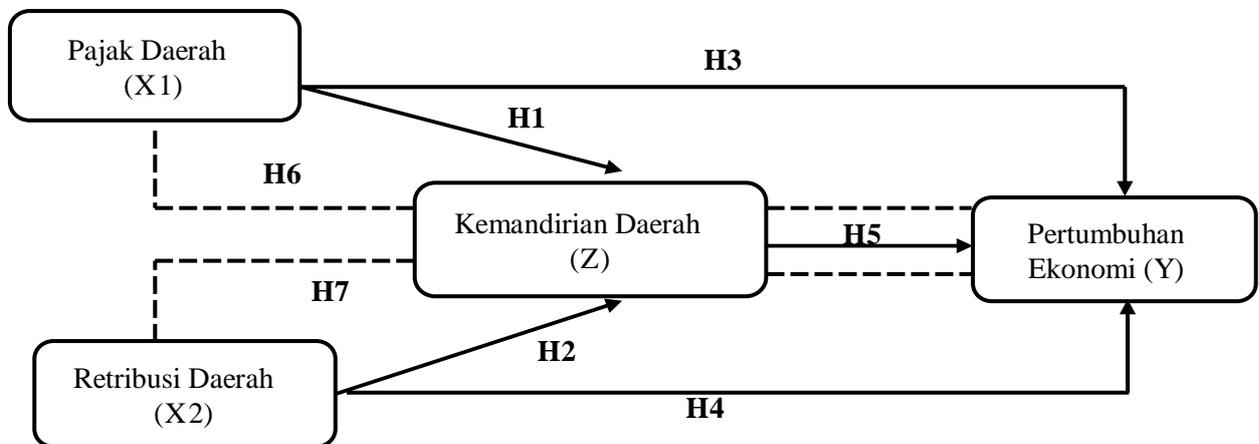
regresi linier berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Sunarto dan Sunyoto, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel intervening Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah namun retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah mampu memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah namun tidak bisa memediasi pengaruh retribusi daerah (Nasjum, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap kemiskinan di kota bitung. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Pendaatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan signifikan secara statistik. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bitung akan tetapi tidak signifikan secara statistik (Paat, Koleangan dan Rumatate 2019).

2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Data Olahan Penulis

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teoritis dan empiris maka hipotesis sebagai berikut

- H1 : Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Daerah
- H2 : Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah.
- H3 : Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- H4 : Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- H5 : Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- H6 : Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Daerah
- H7 : Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Daerah

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara (Indrianto, 2013). Sumber data yang dimaksud Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PAD, Dana Transfer dan Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado dan sekunder time series 15 tahun yaitu tahun 2007-2021 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Manado.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari data sekunder dengan pengumpulan data yang digunakan yaitu *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dan *Documentary Study* (Dokumentasi).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.
2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Kemandirian Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
4. Pertumbuhan Ekonomi pada Kota Manado. Pertumbuhan Ekonomi adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah yang dihitung dengan satuan rupiah.

Metode Analisis Data

1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Model regresi dikatakan baik apabila model tersebut memiliki data residualnya terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016). Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 , maka disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi. Berbeda saat nilai tolerance $< 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 , hal ini berarti telah terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memiliki tujuan dalam pengujian apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi dikatakan baik apabila homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melihat ada atau tidak heteroskedastisitas pada penelitian ini yaitu diuji menggunakan Uji *Glejser*. Pada pengujian ini apabila nilai probabilitas *Obs*R-Squared* $>$ dari 0,05 maka tidak ada masalah heteroskedastisitas, sebaliknya apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model uji *Bruesch Godfrey* atau sering dinamakan dengan uji *Langrange Multiplier* (LM test). Apabila nilai probabilitasnya $>$ dari 0,05 artinya tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya apabila nilai

probabilitasnya < dari 0,05 artinya terdapat masalah autokorelasi. Olehnya model regresi yang baik yaitu model regresi yang tidak ada masalah autokorelasi.

2. Analisis Jalur (Path Analysis)

Analisis jalur merupakan perluasan dari persamaan regresi sederhana atau regresi berganda yang digunakan pada jalur hubungan-hubungan variabel yang lebih dari satu persamaan. Penelitian ini menggunakan analisis jalur untuk mengetahui pengaruh tidak langsung variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi daerah. Pembentukan analisis jalur dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi.

3. Uji Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara atas rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dengan bentuk berupa kalimat pernyataan. Penelitian dalam pengujian hipotesis menetapkan dengan menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan Hipotesis (H_1).

a. Uji signifikan secara individual (Uji t)

Uji t dipakai untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat kita lihat dari taraf sig penelitian dan dibandingkan dengan taraf $\alpha 1\%$, $\alpha 5\%$, $\alpha 10\%$.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F statistik dipakai untuk mengetahui besarnya pengaruh secara bersamasama dari variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat.

c. Uji Koefisien Determinan (R^2)

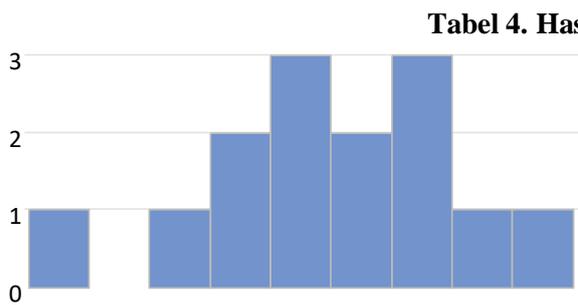
Koefisien Determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel independen penelitian dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien adalah antara nol sampai satu. Apabila nilainya mendekati satu itu berarti variabel-variabel independen menunjukkan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dari variabel dependen penelitian.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Analisis

1. Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas



Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Series: Residuals	
Sample 2007 2020	
Observations 14	
Mean	-5.70e-14
Median	-0.080368
Maximum	3.284804
Minimum	-4.252359
Std. Dev.	2.074311
Skewness	-0.217769
Kurtosis	2.560911
Jarque-Bera	0.223121
Probability	0.894437

Sumber : Eviews 12.0

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar $0.894437 > \alpha 5\%$ dan uji statistik Jarque-Berra sebesar $0,953304 >$ dari nilai α pada tingkat 5% sehingga error terms terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	7171.912	17950.31	NA
X1	17.58024	28730.05	25.39850
X2	0.000826	11859.82	2.406481
Z	1.17E-05	223.0945	20.86081

Sumber : Eviews 12.0

Dari hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai centered VIF variabel independen X1 lebih besar dari 10, VIF variabel X2 lebih kecil dari 10 dan VIF variabel Z lebih besar dari 10, maka ini menandakan bahwa dalam penelitian ini terjadi masalah multikolinearitas pada variabel independen yang digunakan.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.910959	Prob. F(3,10)	0.0872
Obs*R-squared	6.526509	Prob. Chi-Square(3)	0.0886

Sumber: Eviews 12.0

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas *Chi-Square* dari *Obs* R-squared* sebesar 0,0886 lebih besar dari α 5%. Hal ini berarti bahwa penelitian ini terbebas dari masalah hetesoskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.468803	Prob. F(2,8)	0.2862
Obs*R-squared	3.760100	Prob. Chi-Square(2)	0.1526

Sumber: Eviews 12.0

Hasil Analisis Jalur

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Berganda Model I

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-20536.18	4160.906	-4.935507	0.0004
X1	1172.437	107.0273	10.95457	0.0000
X2	-2.832372	2.383300	-1.188425	0.2597

Sumber: Eviews 12.0

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Berganda Model II

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	122.6865	84.68714	1.448702	0.1780
X1	-12.00201	4.192880	-2.862474	0.0169
X2	0.071190	0.028740	2.477063	0.0327
Z	0.007639	0.003423	2.231857	0.0497

Sumber: Eviews 12.0

4.2 Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Pada tabel hasil regresi model I diperoleh hasil bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif maka dalam hal ini variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat besaran pajak daerah, maka kemandirian daerah juga akan semakin meningkat. Sebaliknya apabila pajak daerah semakin menurun, maka kemandirian daerah juga rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (I Nyoman Darmayasa, 2013) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah. Kemandirian Daerah merupakan kemampuan daerah dalam membiayai keperluan belanja dengan mengurangi ketergantungan dari pihak luar atau dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Penjabaran tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi pajak daerah menunjukkan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menerima pendapatan dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Pada tabel hasil regresi model I diperoleh hasil bahwa retribusi daerah tidak berkorelasi signifikan terhadap kemandirian daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemandirian daerah. Dikarenakan porsi retribusi daerah sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang memang merupakan pendapatan asli daerah yang paling dominan. Penerimaan retribusi terkait dengan tingkat aktivitas sosial ekonomi, masyarakat yang menggunakan produk dan jasa yang disediakan pemerintah. Retribusi memberikan produk dan jasa secara langsung sehingga masyarakat yang menggunakan produk dan jasa pemerintah diwajibkan membayar tarif yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Linggar, (2016) menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Klaten tahun 2008 sampai tahun 2016.

3. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis yang menyatakan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah diterima berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat besaran pajak daerah, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin meningkat. Sebaliknya apabila pajak daerah semakin menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin menurun.

Hasil Penelitian ini didukung penelitian terdahulu dilakukan Dewi, & Budhi, (2018) bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian oleh Ojong, Ogar & Arikpo, (2016) bahwa dampak yang dihasilkan dari peningkatan pendapatan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Sunarto & Sunyoto, (2016) mengungkapkan bahwa pendapatan pajak daerah digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah termasuk untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Perpajakan dalam otonomi daerah diterapkan guna menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah maupun rakyat dalam melaksanakan iuran pajak daerah yang dibayarkan rakyat dan aktivitas ekonomi itu sendiri telah memberikan kontribusinya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

4. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan memberikan tambahan masukan bagi pemerintah daerah. Sebagai umpan balinya, pemerintah daerah memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh daerah guna memajukan roda perekonomian seperti pembangunan prasarana di daerah. Fasilitas prasarana yang baik mendorong investor untuk meningkatkan usaha di daerah. Fasilitas prasarana tidak hanya berbentuk perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya. Tetapi keamanan di daerah menjadi faktor pendorong berkembangnya usaha. Jika usaha di daerah berkembang akan menyerap tenaga kerja daerah. Hal ini berdampak terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sunarto & Sunyoto, (2016) yang menunjukkan pajak daerah dan retribusi berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap kemandirian daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Tengah.

5. Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam hasil regresi pada model II diperoleh hasil bahwa kemandirian daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dilihat dari hasil nilai probabilitas sebesar $0,0031 < \alpha 5\%$. Sehingga secara parsial kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Manado.

Ketika otonomi mulai digulirkan harapan yang muncul adalah daerah menjadi semakin mandiri di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing melalui penyerahan pengelolaan wilayahnya sendiri. Sesuai asas *money follows function*, penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat di era Orde Baru. Dengan demikian Daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusannya sendiri sebab sumber-sumber pembiayaan juga sudah diserahkan. Jika mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian Daerah dapat direalisasikan (Joko Tri Haryanto, 2006). PAD yang tinggi berarti daerah mampu memberdayakan sumber daya yang dimiliki dengan sangat baik. Sehingga mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Demikian halnya, jika daerah semakin mandiri akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prabawa & Noviani, 2012) menunjukkan bahwa Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

6. Pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian daerah

Besarnya pengaruh tidak langsung pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian daerah sebesar 0,0089 dan pengaruh langsung sebesar 0,0711 yang berarti nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pada nilai pengaruh langsung sehingga secara tidak langsung nilai pajak daerah melalui kemandirian daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang lebih ditetapkan oleh pemerintah daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan meningkatkan tingkat kemandirian pemerintah daerah untuk tidak lagi menggantungkan sumber pendanaan pemerintahan daerahnya pada dana perimbangan, terutama pada dana transfer sehingga lebih meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun hasil analisis jalur, dimana kemandirian daerah sebagai variabel intervening dapat dibuktikan dari hasil uji *Variance Account For* (VAF). Hasilnya menunjukkan bahwa kemandirian daerah tidak dapat memediasi pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.

7. Pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian daerah

Besarnya pengaruh tidak langsung retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian daerah yaitu sebesar -0,0215 dan pengaruh langsung sebesar 0,0711 yang berarti nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari nilai pengaruh langsung sehingga secara tidak langsung retribusi daerah melalui kemandirian daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan retribusi daerah yang diterima daerah dari pemerintah pusat tidak menjadi sumber pendanaan utama pemerintah daerah. Hasil penelitian ini disebabkan karena pemerintah

daerah belum mampu menjadikan retribusi daerah sebagai bagian yang terpenting dari pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah, sehingga kontribusi dan pengaruh pajak dan retribusi terhadap pembiayaan pembangunan masih sangat minim. Jelas bahwa selama ini pemerintah sangat tergantung dan berharap pada aliran dana transfer. Untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun hasil analisis jalur, dimana kemandirian daerah sebagai variabel itervening dapat dibuktikan dari hasil uji *Variance Account For* (VAF). Hasilnya menunjukkan bahwa kemandirian daerah tidak dapat memediasi retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah Kota Manado 2007-2021.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah Kota Manado 2007-2021.
3. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado 2007-2021.
4. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado 2007-2021.
5. Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado 2007-2021.
6. Pajak daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian daerah Kota Manado 2007-2021.
7. Retribusi daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado 2007-2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Anggraini, Y., Puranta, H. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja*. STI Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Ariyani Enny. (2009). Perencanaan Produksi Dengan Metode De Novo Programming Untuk Memperoleh Keuntungan Yang Maksimal Di Pt. Keramik Diamond Industries Gresik. *Jurnal Penelitian Ilmu Teknik*, 9(2), 130–142.
- Dewi, J.K., Budhi, M. K. S. (2018). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(7).
- Gafar, A. Abdul. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Maluku Utara 2014-2018). *Pengaruh Pendapatan Kinerja Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Maluku Utara 2014-2018)*, 1–17.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Universitas Diponegoro. Semarang.
- I Nyoman Darmayasa, I. M. B. (2013). Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak sebagai Penopang Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Bisnis Kewirausahaan*, 9(0).
- Indrianto, N. dan B. S. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPF. Aulia Nabillah Panigoro

- Joko Tri Haryanto, E. S. A. (2006). *Kemandirian daerah: sebuah perspektif dengan metode path analysis. XXXV (4) A*. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=92190#>
- Juwari, Setyadi, D., & Ulfah, Y. (2016). *Pengaruh Pajak dan Retribusi serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Desember*.
- Lingar, A. P. & A. H. (2016). *Kiat BISNIS Volume 6 No. 3 Juni 2016*. 6(3), 346–356.
- MIFTAHUL RESKI PUTRA NASJUM. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018). *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.
- Miswar, Putri Yudistira Lianda, & Riha Dedi Priantana. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas)* , 2, 153–169.
- Nasution. (2009). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara. Jakarta
- Ojong, C.M., Ogar, A. And Arikpo, O. F. (2016). *The Impact of Tax Revenue on Economic Growth: Evidence from Nigeria IOSR Journal of Economic and Finance*. 7, 32–38.
- Paat, D. C., Koleangan, R. A. M., & Rimate, V. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 1–10. <https://doi.org/10.35794/jpekd.15774.19.1.2017>
- Prabawa, M. A. M., & Noviari, N. (2012). Pengaruh kualitas pelayanan dan sikap terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Badung Utara. *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Udayana*, 1(2), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/2060>
- Siagian, M. (2018). Peranan Disiplin Kerja Dan Kompensasi Dalam Mendeterminasi Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pt Cahaya Pulau Pura Di Kota Batam. *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*, 6(2). <https://doi.org/10.33884/jimupb.v6i2.675>
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak daerah & retribusi daerah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sunarto, & Sunyoto, Y. (2016). PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Dharma Ekonomi*, 43(23), 13–22.